

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minyak bumi merupakan sumber energi fosil tak terbarukan yang menjadi fondasi utama peradaban dunia. Selain digunakan secara luas dalam sektor transportasi, minyak juga menjadi bahan bakar industri, rumah tangga, hingga bahan baku penting dalam proses manufaktur (Graham & Atigui 2024). Menurut laporan dari International Energy Agency (IEA), lebih dari 80% kebutuhan energi global saat ini masih disuplai oleh energi fosil, dengan minyak bumi sebagai kontributor utama di antara ketiganya, bersama batubara dan gas alam (IEA, 2023). Ketergantungan tinggi ini menjadikan minyak tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang memengaruhi hubungan internasional (Tanaka, 2018). Negara-negara pemilik cadangan besar minyak memiliki posisi tawar geopolitik yang kuat, sementara negara pengimpor harus merancang kebijakan luar negeri yang kompleks untuk menjamin keamanan pasokan energinya. Dalam konteks ini, minyak tidak hanya menopang aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen politik internasional.

Minyak sering kali menjadi sumber ketegangan dan konflik, karena distribusi cadangan minyak yang tidak merata menciptakan ketimpangan antara negara produsen dan konsumen. Laporan dari OECD menyebutkan bahwa fluktuasi harga minyak yang dipicu oleh krisis geopolitik dapat memicu instabilitas ekonomi di negara-negara pengimpor, terutama yang tidak memiliki diversifikasi sumber energi domestik yang memadai (OECD, 2023). Oleh karena itu, dalam ekonomi global yang saling terhubung, ketahanan energi menjadi salah satu isu utama dalam diplomasi internasional dan kebijakan strategis nasional, terutama dapat menjadi isu sentral bagi negara dengan ketergantungan impor dari sumber energi tersebut, seperti Jepang.

Jepang sebagai negara yang memainkan peran vital dalam pembangunan global menjadikannya salah satu negara yang memerlukan energi dengan jumlah besar (Taqiyya, 2023). Sebagai negara dengan industri maju, Jepang dikenal memiliki kemajuan teknologi yang tinggi serta tingkat konsumsi energi yang besar untuk menopang aktivitas ekonominya (Taqiyya, 2023). Sejak masa pasca-Perang Dunia II, Jepang berhasil melakukan modernisasi ekonomi secara besar-besaran dan tumbuh menjadi salah satu pusat manufaktur dan inovasi teknologi di dunia (World Bank, 2023). Keunggulan ini tidak hanya terlihat dalam ekspor produk otomotif dan elektronik, tetapi juga dalam kemampuan riset dan pengembangan yang kompetitif di tingkat internasional. Dengan populasi lebih dari 120 juta jiwa dan infrastruktur industri yang sangat kompleks, kebutuhan energi Jepang terkhusus minyak, terus meningkat sebagai bagian untuk menopang industri dan rumah tangga (Kemp, 2024).

Tahun	Konsumsi Minyak Negara Jepang dalam Barel per Hari (B/D)
2021	3.3 Juta
2022	4.01 Juta
2023	3.2 Juta
2024	Lebih dari 3 Juta (Data Perkiraan)

Tabel 1.1 . Sumber: Energy Information Agency (2022), Trading Economics (2024), dan Reuters) (2023)

Minyak digunakan secara luas di berbagai sektor domestik Jepang, dengan konsumsi terbesar berasal dari sektor transportasi yang mencakup kendaraan pribadi, logistik, transportasi publik, hingga industri aviasi yang menyerap sekitar 40–50% dari total konsumsi nasional (International Energy Agency, 2022). Di luar sektor transportasi, industri petrokimia, baja, dan manufaktur otomotif juga menjadi pengguna energi minyak yang signifikan, terutama dalam proses produksi berintensitas energi tinggi (JOGMEC, 2023). Meskipun Jepang telah mengurangi penggunaan

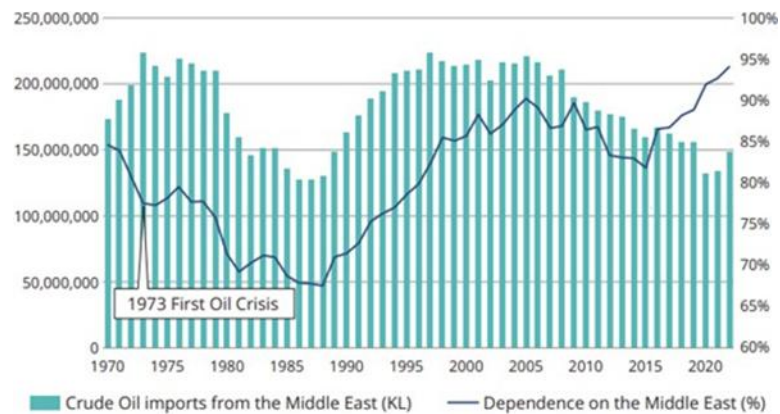
pembangkit listrik berbasis minyak dalam beberapa dekade terakhir dengan mengalihkan bauran energi ke gas alam cair (LNG) dan energi nuklir, peran minyak belum sepenuhnya tergantikan. Dalam situasi krisis atau gangguan pasokan energi global, minyak tetap menjadi sumber energi cadangan yang strategis dan vital bagi Jepang (BP, 2022). Bagi negara seperti Jepang yang tidak memiliki sumber daya energi domestik, ketahanan energi bukan sekadar soal efisiensi, melainkan menyangkut kemampuan negara dalam memastikan keberlangsungan kehidupan ekonomi dan sosial secara menyeluruh Blazek dan Yamaguchi (2021).

Akan tetapi, di balik pencapaian modernisasi ekonomi dan kemajuan teknologinya, Jepang menghadapi tantangan struktural yang sangat serius dalam sektor energi, khususnya terkait dengan keterbatasan sumber daya energi alam. Negara ini secara geografis miskin akan sumber daya alam strategis, termasuk minyak bumi, gas alam, dan batubara. Hingga masa pemerintahan 2021-2024, Jepang hampir tidak memiliki cadangan minyak mentah dalam jumlah signifikan yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Produksi minyak domestik Jepang hanya berada pada kisaran 3.000 hingga 5.000 barel per hari, angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan energi harian nasional yang melebihi tiga juta barel (The Global Economy, 2023). Ketimpangan yang sangat besar antara produksi dan konsumsi ini menjadikan Jepang sebagai salah satu negara pengimpor energi terbesar di dunia. Tentunya *gap* ini menjadikannya sebagai *consumer countries* yang sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan secara impor, salah satunya dari negara-negara Timur Tengah (Chen, Chang, Shun, 2015).

Ketergantungan Jepang terhadap minyak dari Timur Tengah bukanlah fenomena baru, melainkan terbentuk secara bertahap sejak dekade 1950-an dan mengalami penguatan struktural pada era pasca-Perang Dunia II (Britannica, 2025). Setelah kehancuran industri domestik akibat perang, Jepang melakukan rekonstruksi ekonomi yang masif melalui proses industrialisasi (Masai, Latz, Hijino, 2025). Secara langsung

meningkatkan kebutuhan energi, khususnya minyak bumi. Jepang, yang tidak memiliki cadangan minyak signifikan, akhirnya mengandalkan kawasan Timur Tengah sebagai pemasok utama demi menjaga keberlangsungan energi nasional (Koyama, 1990; Samuels, 2007). Selama era 1960 hingga 1970-an, ketergantungan ini makin diperdalam melalui kontrak-kontrak jangka panjang dengan negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab. Kilang-kilang Jepang pun mulai dirancang dan diadaptasi secara teknis untuk mengolah jenis minyak mentah berat dari kawasan tersebut, sehingga memperkuat ketergantungan struktural terhadap suplai tertentu (Yergin, 2011). Bahkan, menurut analisis dari Institute of Energy Economics, Japan (IEEJ), sekitar 90% impor minyak Jepang pada era 1980-an sudah bersumber dari Timur Tengah. Ini bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan pengaruh dari faktor geografis, efisiensi logistik, dan stabilitas hubungan bilateral (IEEJ, 2019).

Ketergantungan struktural ini bukan hanya dilandasi oleh faktor teknis dan ekonomi, tetapi juga oleh pendekatan diplomatik Jepang yang menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai mitra strategis dalam sektor energi. Hingga saat ini, Jepang secara aktif membangun hubungan ekonomi-politik dengan negara-negara teluk melalui diplomasi energi, bantuan pembangunan, dan partisipasi di proyek eksplorasi serta infrastruktur (Calder, 2004). Kondisi ini menjadikan relasi Jepang–Timur Tengah tidak sekadar hubungan dagang biasa, melainkan hubungan yang melekat secara struktural dalam kebijakan luar negeri dan strategi energi nasional Jepang (Tanaka, 2018).



Gambar 1.1 Data Persentase Impor Minyak Jepang dari Timur Tengah.

Sumber: Agency for Natural Resources and Energy

Kawasan Timur Tengah yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan energi Jepang memegang peran strategis yang tidak tergantikan dalam menjamin kelangsungan pasokan minyak dan gas bagi negara tersebut. Hubungan ini bukan sekadar bersifat ekonomi, tetapi telah menjadi fondasi penting dalam arah kebijakan luar negeri Jepang yang bertumpu pada keamanan energi. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Jepang melalui *Diplomatic Bluebook*, kawasan Timur Tengah terus dianggap sebagai mitra utama dalam mendukung stabilitas energi nasional Jepang. Bahkan dalam periode kontemporer, yaitu kurun waktu 2021–2024, lebih dari 90% kebutuhan minyak mentah Jepang masih dipenuhi oleh impor dari negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) (IEA, 2022).

Arab Saudi dan UEA tidak hanya memainkan peran utama sebagai pemasok energi, tetapi juga menjadi kunci bagi Jepang dalam membangun kemitraan strategis di Timur Tengah (Matsuda, 2023). Kedua negara tersebut menempati posisi dominan sebagai pemasok utama minyak mentah bagi Jepang, dengan masing-masing menyumbang proporsi terbesar dalam total impor minyak Jepang dibandingkan negara-negara Timur Tengah lainnya. Arab Saudi sebagai eksportir utama, secara konsisten menyuplai sekitar 40% dari total kebutuhan minyak Jepang (Gracia, 2023).

Sementara itu, UEA turut menjadi penyedia terbesar, dengan kontribusi yang bahkan melampaui Arab Saudi dalam beberapa periode (Zawya, 2024). Kemitraan Jepang dengan kedua negara ini tidak hanya terikat pada perdagangan minyak mentah, tetapi juga meluas ke bentuk kerja sama strategis, seperti dengan *Gulf Cooperation-Council* (GCC). Di sisi lain, dalam catatan diplomatiknya pada rentang tahun 2021-2024, negara-negara Timur Tengah terutama yang terafiliasi dengan GCC telah berkontribusi bagi ekonomi Jepang sebesar 6,86% secara keseluruhan (Gulf Cooperation Council, 2025).

Ketergantungan Jepang terhadap impor minyak dalam jumlah besar menjadikannya sangat rentan terhadap berbagai bentuk ketidakstabilan global (Golubkova, 2023). Dalam sistem energi yang saling terhubung secara internasional, gangguan sekecil apa pun baik dalam distribusi, produksi maupun kebijakan negara pemasok, dapat menimbulkan dampak signifikan bagi negara pengimpor seperti Jepang (Zhou, Li, dan Zhao, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa ketahanan energi nasional Jepang sangat bergantung pada kondisi eksternal, dan ketika terjadi tekanan global terhadap pasokan minyak, berbagai sektor domestik di Jepang pun terkena dampaknya secara langsung (Brans, 2024).

Sepanjang 2021-2024, Jepang menghadapi serangkaian tantangan kompleks dalam mengelola ketergantungan minyak dari Timur Tengah. Secara struktural, ketergantungan Jepang terhadap minyak dari Timur Tengah bukan hanya persoalan volume pasokan, tetapi juga menyangkut dinamika geopolitik yang kompleks dan ketidakstabilan regional yang melekat. Ketergantungan ini menjadikan Jepang sangat rentan terhadap krisis seperti ketegangan di Selat Hormuz, embargo minyak terhadap Iran, maupun konflik di Yaman dan Suriah yang dapat mengganggu jalur distribusi energi (Lamont, 2023). Kondisi ini membentuk struktur kerentanan yang tidak bisa diabaikan, mendorong Jepang untuk mengambil posisi aktif melalui pendekatan diplomatik dan kerja sama luar negeri guna menjaga stabilitas kawasan sebagai bagian

integral dari strategi energinya (Miyagi, 2016).

Tahun	Konflik Signifikan	Dampak
2021	Konflik Houthi terhadap relasi Arab Saudi dan Iran	Ketegangan di Selat Hormuz sebagai jalur distribusi
2022	Perang Sipil Yaman dan Konflik Rusia-Ukraina	Ketegangan di Selat Hormuz sebagai jalur distribusi dan stabilitas pasokan serta harga minyak
2023	Perang Israel-Hamas	Memicu ketidakstabilan kawasan
2024	Perang Israel-Hamas dan Ancaman Houthi	Ketidakamanan distribusi

Tabel 1.2 Konflik Signifikan di Timur Tengah Terhadap Pasokan Minyak Jepang 2021-2024.

Sumber: Diolah oleh penulis dari Khan (2022), Drysdale (2022), dan Harsono & Ceria (2024).

Sejumlah konflik utama di Timur Tengah (2021–2024) yang memiliki konsekuensi langsung terhadap jalur distribusi energi, terutama Selat Hormuz dan Bab al-Mandeb. Karakter geografis dan strategis kedua jalur ini membuatnya sangat rentan terhadap gangguan, mengingat hingga 30 % pasokan minyak global melewati Selat Hormuz. Sebagai contoh, konflik Houthi dan perang Yaman pada 2021–2022 menyebabkan serangan terhadap kapal dagang dan meningkatkan premi asuransi, yang berdampak signifikan pada efisiensi distribusi energi. Data riset menunjukkan lalu lintas kapal menurun hingga 80 % di Selat Bab al-Mandeb, memaksa *rerouting* ke jalur alternatif seperti Tanjung Harapan, yang menambah biaya dan waktu pengiriman (Rodriguez-Diaz et al., 2024). Selain itu, eskalasi konflik Israel-Hamas di 2023–2024 semakin memperumit situasi, dengan risiko serangan lintas perairan yang mempersempit ruang diplomasi dan menambah ketidakpastian pasokan (Ali-Khan,

2024). Studi juga menyebut bagaimana insiden di dan sekitar Selat Hormuz, termasuk pengeboman tanker di Laut Oman mengakibatkan negara-negara importir utama, termasuk Jepang, harus memperkuat koordinasi militer dan diplomatis guna mempertahankan stabilitas pasokan minyak (Ariffin & Zulkifli, 2023).

Secara keseluruhan, rangkaian konflik ini menciptakan kondisi volatilitas dan kerentanan struktural dalam sistem distribusi energi global. Jepang, sebagai negara pengimpor besar dari kawasan tersebut, harus secara proaktif tidak hanya mengantisipasi gangguan teknis, tetapi juga beradaptasi dalam konteks geopolitik dengan merumuskan strategi seperti diversifikasi pasokan, diplomasi pertahanan maritim, dan investasi dalam cadangan strategis serta alternatif energi (BP News, 2024; Drysdale, 2022; Harsono & Ceria, 2024).

Lebih lanjut, tantangan tersebut diperparah oleh kondisi eksternal kawasan seperti konflik Rusia-Ukraina sejak Februari 2022 yang telah mengguncang stabilitas geopolitik global dan mengganggu rantai pasokan energi dunia. Rusia merupakan salah satu dari tiga produsen minyak terbesar dunia. Ketika sanksi dijatuhkan, ekspor minyak mentah dan produk olahan Rusia ke Eropa dan Amerika Serikat (AS) menurun drastis. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan suplai dan permintaan, yang mendorong harga minyak melonjak hingga lebih dari \$120 per barel pada pertengahan 2022 (Salem et al., 2025). Pembatasan ekspor minyak dan gas menyebabkan lonjakan harga minyak mentah global hingga lebih dari 50% (Zhang et al., 2024). Negara-negara barat seperti AS dan Eropa yang berusaha mengurangi ketergantungan pada energi Rusia turut mempersempit opsi pasokan global.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dua kondisi global baik dari kawasan Timur Tengah maupun segala akibat dari konflik Rusia-Ukraina tidak hanya berdampak pada sistem energi global, tetapi juga menimbulkan tekanan serius terhadap sektor domestik di Jepang. Lonjakan harga minyak mentah global secara langsung menyebabkan kenaikan harga bahan bakar domestik, yang kemudian mendorong

inflasi dan memperburuk beban biaya hidup masyarakat Jepang. Data dari Bank of Japan menunjukkan bahwa tingkat inflasi energi meningkat lebih dari 20% sepanjang tahun 2022, terutama pada sektor listrik dan bahan bakar transportasi (Bank of Japan, 2023). Kenaikan harga energi ini turut memberikan dampak berantai terhadap biaya produksi sektor manufaktur dan logistik yang selama ini sangat bergantung pada pasokan energi berbasis minyak. Selain itu, beban fiskal pemerintah meningkat akibat perluasan subsidi energi serta intervensi kebijakan untuk meredam dampak ekonomi pada rumah tangga berpendapatan rendah (Incekara & Incekara, 2024). Di tingkat sosial, masyarakat mulai merasakan tekanan pada kebutuhan pokok akibat kenaikan ongkos distribusi dan operasional. Bahkan, perusahaan skala kecil dan menengah mengalami kesulitan dalam mendapatkan keuntungan di tengah kenaikan biaya energi yang signifikan (Shi et al., 2025). Situasi ini mencerminkan bahwa krisis energi global tidak hanya bersifat eksternal, tetapi secara substansial mengguncang fondasi ekonomi domestik Jepang yang sangat tergantung pada impor energi. Oleh karena itu, konflik Rusia–Ukraina bukan sekadar krisis regional, melainkan katalisator krisis domestik yang mendesak pemerintah Jepang untuk mempercepat penyesuaian kebijakan energi yang strategis.

Situasi ini mengharuskan Jepang untuk merumuskan strategi energi yang adaptif serta memastikan respons yang terkoordinasi di berbagai tingkat kebijakan. Pasokan minyak tidak lagi sekadar persoalan cadangan alam, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi, stabilitas politik, serta perubahan dalam dinamika hubungan internasional (Ross, 2008). Mengelola ketergantungan minyak turut berarti memastikan keberlanjutan terhadap kebutuhan, yang juga dapat diartikan mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan. Ketika konflik global seperti perang Rusia–Ukraina mengganggu keseimbangan pasokan-permintaan minyak dunia, negara-negara dengan ketergantungan tinggi seperti Jepang terdorong untuk melakukan penyesuaian dalam mengelola ketergantungan minyak dari Timur Tengah, baik melalui diversifikasi sumber energi dan intensifikasi hubungan strategis dengan negara-negara

produsen. Kerentanan ini membawa Jepang untuk bertindak memastikan produksi serta distribusi yang baik serta menjadikan isu energi sebagai salah satu pilar utama dalam kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional Jepang. Dengan posisi strategisnya sebagai sumber utama energi, Timur Tengah terus menjadi perhatian utama dalam dinamika internal Jepang.

Dalam hal ini tentu dinamika internal Jepang berperan signifikan dalam proses perumusan kebijakan. Sebagai respons terhadap tingginya tingkat ketergantungan terhadap minyak impor, Jepang di bawah pemerintahan tahun 2021-2024 secara strategis mengembangkan pendekatan multidimensi guna mengelola risiko energi nasional. Pendekatan ini mencakup diversifikasi sumber energi melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, pengembangan infrastruktur penyimpanan minyak cadangan, serta peningkatan efisiensi konsumsi energi domestik. Langkah ini didasari oleh pengalaman historis Jepang yang berkali-kali terdampak oleh fluktuasi geopolitik global, serta sebagai bentuk antisipasi terhadap guncangan harga dan pasokan seperti yang terjadi saat menghadapi krisis (Yago, 2020). Dengan demikian, Jepang memerlukan peran lembaga-lembaga pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan dalam merespons guncangan global tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan Boin (2005), suatu masalah yang mengancam kepentingan nasional maka dapat memicu reaksi dari kepala negara dan pemangku kepentingan terkait. Peran Lembaga-lembaga utama seperti Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI), Kementerian Luar Negeri (MOFA), dan Kantor Kabinet Perdana Menteri, berkoordinasi untuk mengelola ketahanan energi nasional di tengah lonjakan harga global dan terbatasnya pasokan minyak internasional (Molinari, 2024). Dalam sistem politik Jepang yang dikenal teknokratik dan birokratis, respon terhadap tekanan global tidak hanya ditentukan oleh struktur internasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kalkulasi strategis elite dan dinamika internal lembaga negara. Sementara itu peran Perdana Menteri Jepang tidak semata-mata bebas, namun justru

keputusan yang diambil itu berdasarkan kepentingan partai dan lembaga-lembaga utama (Burrett, 2023). Dengan demikian hal tersebut memperlihatkan keterkaitan erat antara tekanan sistem internasional dan pengaruh domestik dalam pembentukan kebijakan, sebuah pendekatan yang selaras dengan kerangka analisis kebijakan luar negeri (Wallace & Pugliese, 2023). Dengan demikian, respon birokrasi Jepang terhadap krisis energi global menjadi pintu masuk yang relevan untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri dijalankan.

Selanjutnya peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai hal yang melatarbelakangi proses Jepang dalam mengelola ketergantungan minyak dari Timur Tengah pada masa pemerintahan 2021-2024 melalui studi kepustakaan dengan beberapa kajian literatur. Ketertarikan peneliti terhadap bagaimana negara-negara besar seperti Jepang merancang dan menjalankan kebijakan luar negeri yang berpijak pada kebutuhan energi nasional menjadi latar belakang utama dalam memilih topik ini. Terlebih lagi, dinamika politik global pasca-invasi Rusia ke Ukraina telah memberikan tekanan tambahan terhadap arsitektur energi internasional, sehingga mendorong pentingnya kajian lebih mendalam mengenai respons kebijakan Jepang dalam mengelola ketergantungannya terhadap energi minyak.

Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 membawa dampak besar terhadap stabilitas energi global. Penelitian Paul Saunders (2024) menunjukkan bahwa perang tersebut mempercepat disrupsi dalam rantai pasok energi global dan memaksa negara-negara importir untuk meninjau ulang strategi ketahanan energi mereka. Georgios Zisis (2024) dan Van Del Graaf (2023) memperkuat pandangan ini dengan menyoroti bagaimana kawasan Eropa melakukan diversifikasi pasokan energi sebagai respons terhadap embargo Rusia, serta menggambarkan pergeseran geopolitik energi global akibat krisis tersebut. Meskipun ketiga studi ini berfokus pada kawasan Eropa dan Rusia, implikasinya turut dirasakan oleh negara-negara lain yang bergantung pada stabilitas pasokan energi global, termasuk Jepang.

Dalam konteks Jepang, sejumlah studi telah membahas dinamika hubungan

energi negara tersebut dengan kawasan Teluk Persia. Heng (2022) menguraikan strategi diplomasi hedging Jepang terhadap Iran dan Amerika Serikat, yang mencerminkan pendekatan hati-hati dalam memastikan stabilitas hubungan dengan dua aktor utama di Timur Tengah. Sebelumnya, Miyagi (2014) mencatat bahwa Jepang cenderung melakukan bandwagoning terhadap kebijakan Amerika Serikat, khususnya dalam merespons konflik di Timur Tengah. Sementara studi tersebut memberikan landasan teoretik yang kuat, konteksnya sudah tidak mencerminkan perkembangan politik pasca-2020.

Fokus yang lebih kontemporer diberikan oleh Brans (2024), yang menekankan bahwa ketergantungan Jepang terhadap minyak dari Teluk tetap tinggi meskipun tanpa dukungan pengaruh politik atau militer yang signifikan di kawasan tersebut. Hal ini diperkuat oleh Matsuda dan Kozhanov (2023), yang menjelaskan bagaimana Jepang mulai menerapkan pendekatan diplomatik multifaset terhadap negara-negara GCC, tidak hanya terkait energi, tetapi juga kerja sama ekonomi dan keamanan. Watanabe (2022) secara khusus menyoroti tantangan pemerintahan era 2021-2024 dalam mengelola ketahanan energi Jepang, termasuk proses diversifikasi pasokan dan penguatan aliansi strategis dengan Amerika Serikat. Lebih jauh, Bakshi (2022) menggarisbawahi bahwa ketergantungan Jepang terhadap energi fosil tidak terlepas dari dampak jangka panjang bencana nuklir Fukushima 2011, yang menyebabkan pergeseran signifikan dalam kebijakan energi nasional, termasuk ketergantungan yang lebih besar terhadap minyak impor, terutama dari Timur Tengah.

Berdasarkan uraian kajian penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa studi mengenai hubungan energi Jepang dengan kawasan Timur Tengah telah dibahas dari berbagai sudut pandang, baik melalui pendekatan ekonomi-politik, diplomasi energi, maupun ketahanan energi nasional. Namun, sebagian besar penelitian tersebut bersifat deskriptif dan belum secara khusus menelaah respons kebijakan luar negeri Jepang terhadap dinamika geopolitik energi global pada periode 2021-2024 ataupun pada saat

terjadinya perang Rusia-Ukraina. Padahal, periode pemerintahan tersebut bertepatan dengan disrupsi pasokan energi global yang cukup signifikan, menuntut adanya penyesuaian strategis dalam hubungan bilateral Jepang dengan negara-negara produsen minyak utama, khususnya Arab Saudi dan UEA. Selain itu, kajian-kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada ketergantungan Jepang terhadap Rusia atau kebijakan energi domestik tanpa membahas secara khusus bagaimana strategi Jepang pada tahun 2021-2024 dalam menjaga hubungan dan pasokan dari Timur Tengah dan disinilah letak relevansi dan kontribusi penelitian ini, yaitu berupaya menjelaskan secara lebih mendalam bagaimana Jepang membentuk merumuskan kebijakan energinya di tengah tekanan eksternal dan kebutuhan domestik yang mendesak, dengan menggunakan perspektif hubungan internasional yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini tidak hanya mengisi celah dalam literatur yang ada, tetapi juga memperkaya pemahaman mengenai orientasi kebijakan luar negeri Jepang dalam mengelola kepentingan nasionalnya di sektor energi.

Oleh karena itu, penelitian dalam skripsi ini dapat menjadi sebuah kebaruan karena secara spesifik menganalisis kebijakan luar negeri Jepang dalam rentang waktu 2021-2024 dalam konteks ketegangan global pasca-invasi Rusia ke Ukraina, dan bagaimana Jepang menyesuaikan strategi untuk mempertahankan pasokan energi minyak dari Timur Tengah. Penelitian ini berfokus menganalisis strategi dan langkah Jepang dalam mengelola ketergantungan minyak Jepang, melalui proses mencapai kepentingannya di Timur Tengah. fokus skripsi ini bukan hanya terkait ketergantungan, namun juga bagaimana Jepang mengelola risiko pasokan melalui pendekatan diplomatik, strategis, dan teknologi. Hal ini penting, sebab tidak hanya untuk memahami strategi energi Jepang secara geopolitik, tetapi juga memberi kontribusi pada kajian kebijakan luar negeri, khususnya dalam memahami diplomasi energi dan ketahanan pasokan pada era global yang tidak stabil. Sebagai bagian dari penelitian ini, akan disoroti pula proses Jepang dalam mempertahankan hubungan diplomatik yang stabil dengan negara-negara pemasok utama dari Timur Tengah,

berdasarkan kepentingan nasionalnya melalui pendekatan kebijakan luar negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Sumber daya energi minyak berperan penting dalam aspek geopolitik global, terkhusus Jepang yang bergantung pada impor minyak. Namun berlangsungnya perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022, kejadian tersebut memberikan gejolak signifikan pada pasokan minyak global, yang diperburuk dengan diterapkannya sanksi internasional terhadap Rusia. Akibatnya, Jepang mengalami tekanan dari sistem internasional yang membuatnya harus merespon ketidakstabilan pasokan minyak global. Untuk itu melalui dinamika domestik Jepang harus mengkaji permasalahan yang ada dan mengelola agar pasokan minyaknya dapat berlangsung aman dalam jangka waktu yang lama. Salah satu langkah yang diterapkan Jepang adalah meningkatkan ketergantungan pada negara-negara di Timur Tengah sebagai pemasok utama. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji **“Bagaimana proses Jepang dalam mengelola ketergantungan minyak dari Timur Tengah 2021-2024?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses Jepang dalam mengelola ketergantungan minyak dari Timur Tengah pada tahun 2021-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat akademis dan manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi penulis serta akademisi di bidang studi Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan hubungan Jepang dengan negara-negara Timur Tengah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya wawasan serta

mendukung penelitian-penelitian di masa depan yang membahas isu-isu terkait.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Jepang dalam merumuskan kebijakan energi luar negeri, perusahaan energi dalam mengatur strategi, dan negara-negara Timur Tengah dalam memperkuat kerja sama strategis dengan Jepang.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki cakupan pada proses Jepang dalam mengelola ketergantungan minyak dari negara-negara Timur Tengah yang terdiri atas GCC sebagai organisasi regional di kawasan serta Arab Saudi dan UEA, yang dikaji melalui teori kebijakan luar negeri. Selain itu penelitian ini hanya mengkaji kebijakan yang dikeluarkan Jepang pada tahun 2021-2024.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini disajikan secara sistematis dan terstruktur, maka penulis akan menyajikan dalam bentuk bab dan sub-bab. Untuk itu terdapat sistematika penulisan yang meliputi enam bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah sesuai dengan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori dan konsep yang dijadikan dasar dalam mengkaji perumusan masalah penelitian. Selain itu juga terdapat alur pemikiran untuk membantu memahami penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian, termasuk objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, serta tabel rencana waktu penelitian.

BAB IV KONDISI ENERGI MINYAK JEPANG PADA TAHUN 2021-2024

Bab ini menjelaskan pengkajian objek penelitian melalui latar belakang, ketergantungan energi, strategi nasional, dan situasi internasional yang memengaruhi dinamika tersebut.

BAB V PROSES KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG DALAM MENGELOLA KETERGANTUNGAN MINYAK DARI TIMUR TENGAH

Bab ini menganalisis kebijakan luar negeri Jepang sebagai respons terhadap situasi di Bab IV, melalui pemikiran Rosenau berdasarkan level sistemik dan pemerintahan yang digunakan pada tahun 2021-2024.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menyajikan hasil analisis dalam bentuk kesimpulan yang ringkas. Bab ini juga berisi saran mengenai aplikasi praktis penelitian ini di lapangan, serta kontribusinya secara teoritis untuk penelitian mendatang.